

Analisis Peran Kebijakan Moneter dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah

Fika Rasidah ^{1*}, Naim²

Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Corresponding Author: fikarasidah@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Kebijakan Moneter, Ekonomi Syariah, Lingkungan.

Received : 1 Januari

Revised : 6 Januari

Accepted : 15 Januari

ABSTRAK

Dalam upaya membangun ekonomi yang berkelanjutan, peran kebijakan moneter memiliki signifikansi yang tak dapat diabaikan, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui sudut pandang ekonomi syariah. Dengan pendekatan penelitian kualitatif, kami menganalisis berbagai sumber seperti jurnal, literatur ilmiah, dan referensi terkait untuk mengeksplorasi beragam pandangan serta temuan dari para ahli ekonomi dan praktisi di bidang ini. Hasil analisis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai instrumen kebijakan moneter yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kami juga mengkaji implikasi kebijakan tersebut terhadap stabilitas harga, investasi, dan pertumbuhan jangka panjang, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sebagai kesimpulan, kebijakan moneter yang diselaraskan dengan prinsip ekonomi syariah dapat berperan sebagai salah satu pendorong utama dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini tentunya perlu memperhatikan aspek-aspek vital seperti pemerataan pendapatan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen terpenting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Peran utamanya adalah mengelola suplai uang, suku bunga, dan aktivitas perbankan. Bank sentral merancang kebijakan ini dengan berbagai tujuan, antara lain untuk mengendalikan tingkat inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu aspek yang paling diperhatikan dalam kebijakan moneter

adalah pengaruhnya terhadap suku bunga, yang pada gilirannya berimbas langsung pada keputusan investasi, konsumsi, dan tabungan masyarakat. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kebijakan moneter memanfaatkan berbagai instrumen. Di antara instrumen tersebut, perubahan biaya pinjaman acuan menjadi salah satu yang paling utama, memungkinkan bank nasional untuk mengelola pergerakan arus keuangan secara efektif. Menurunkan suku bunga dapat mendorong peningkatan pinjaman dan investasi, karena biaya pinjaman yang lebih rendah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika suku bunga dinaikkan, hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran dan melambatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga mencegah terjadinya *overheating*.

Salah satu alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur suku bunga jangka pendek dan likuiditas pasar adalah operasi pasar terbuka, di mana bank sentral melakukan pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Selain itu, penetapan giro wajib minimum bagi bank-bank komersial juga berfungsi untuk mempengaruhi likuiditas pasar dan ketersediaan kredit. Dalam konteks ini, kebijakan moneter memiliki peran krusial dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seimbang, dan berjangka panjang. Dalam konteks ekonomi syariah, penting bagi kebijakan moneter untuk tidak hanya menimbang faktor-faktor ekonomi makro, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika, distribusi pendapatan, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Ketika membahas pentingnya kebijakan moneter yang bijaksana, sangat relevan untuk memperhatikan kemampuannya dalam memengaruhi distribusi pendapatan. Kebijakan yang terlalu menguntungkan segelintir pihak dapat memperlebar kesenjangan pendapatan, sehingga menghambat upaya menuju pembangunan ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, pendekatan yang tepat dalam kebijakan moneter dapat mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata, yang menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan moneter juga memiliki dampak signifikan terhadap pelestarian lingkungan. Kebijakan yang mengabaikan aspek lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, yang pada gilirannya dapat membahayakan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kebijakan moneter untuk mempertimbangkan aspek lingkungan secara komprehensif, agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat berkelanjutan dan seimbang secara ekologis.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merujuk pada rangkaian tindakan yang diambil oleh otoritas moneter, yaitu bank sentral, untuk mengatur jumlah uang yang beredar serta tingkat suku bunga dalam suatu perekonomian. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencapai stabilitas ekonomi, yang mencakup pengendalian inflasi, pendorongan pertumbuhan ekonomi, dan pemeliharaan keseimbangan neraca pembayaran.

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan moneter memiliki peranan krusial dalam menciptakan kondisi makroekonomi yang stabil. Stabilitas ini sangat diperlukan untuk mendukung investasi jangka panjang, yang merupakan pondasi penting bagi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan inklusif. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih luas.

Teori Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Teori pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip utama dari teori ini terletak pada tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1. **Ekonomi:** Memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif agar semua lapisan masyarakat dapat mengambil manfaat dari kemajuan tersebut.
2. **Sosial:** Mengurangi kesenjangan sosial dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
3. **Lingkungan:** Melestarikan sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang, sehingga ekosistem tetap terjaga.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembangunan ekonomi berkelanjutan juga mencakup dimensi spiritual dan etika. Hal ini meliputi keadilan distributif, penghapusan riba, serta pengelolaan sumber daya yang berlandaskan pada prinsip masalah, yaitu kemaslahatan bersama.

Teori Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang secara tegas melarang praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan aktivitas ekonomi yang diharamkan. Beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi:

1. Penyaluran kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan sedekah.
2. Mencapai harmoni antara kebutuhan material dan spiritual.
3. Setiap kegiatan ekonomi seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam ranah kebijakan moneter, ekonomi syariah mendorong penggunaan instrumen keuangan yang berlandaskan kemitraan, seperti mudharabah dan musyarakah, serta melarang penerapan bunga sebagai mekanisme kebijakan moneter. Di samping itu, bank sentral syariah memiliki peran vital dalam menciptakan stabilitas moneter yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendalami peran kebijakan moneter dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks ekonomi syariah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan analisis yang komprehensif terhadap

berbagai aspek yang relevan dengan topik yang diangkat. Sumber data utama penelitian ini diperoleh melalui analisis literatur, mencakup referensi dari berbagai jurnal, buku, dan studi kasus yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data tersebut dikumpulkan melalui tinjauan literatur sebelumnya serta masukan dari para ahli di bidang kebijakan moneter dan ekonomi syariah. Setelah pengumpulan data, tahapan selanjutnya adalah verifikasi untuk memastikan akurasi dan validitas informasi. Proses verifikasi ini merujuk pada akreditasi jurnal atau indeks jurnal yang terakreditasi, guna memastikan kredibilitas data yang digunakan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian bertujuan untuk meraih pemahaman mendalam mengenai peran kebijakan moneter dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dari sudut pandang ekonomi syariah.

HASIL PENELITIAN

1. Prinsip Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah ditandai oleh sejumlah prinsip fundamental yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Larangan Riba: Dalam ekonomi syariah, transaksi keuangan dilarang untuk mengenakan bunga. Sebagai gantinya, sistem bagi hasil menjadi metode utama dalam operasional finansial.
- b. Keadilan Ekonomi: Kebijakan moneter seharusnya berfokus pada distribusi kekayaan yang adil serta berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada.
- c. Investasi di Sektor Riil: Ekonomi syariah memprioritaskan investasi dalam kegiatan ekonomi yang memberikan dampak nyata, seperti pertanian, manufaktur, dan energi terbarukan.
- d. Etika dan Keberlanjutan: Setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai moral serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

2. Peran Kebijakan Moneter dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Dari sudut pandang ekonomi syariah, kebijakan moneter memiliki peran strategis yang krusial dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yaitu:

- a. Pengelolaan Stabilitas Inflasi: Dalam kerangka ekonomi syariah, menjaga stabilitas harga merupakan salah satu tujuan utama kebijakan moneter. Pengendalian inflasi dilakukan dengan cara menghindari kelebihan likuiditas tanpa harus bergantung pada suku bunga. Sebagai contoh, pengaturan jumlah uang yang beredar dapat dilaksanakan melalui instrumen syariah seperti sukuk atau wakaf produktif.
- b. Pemberdayaan Sektor Riil: Ekonomi syariah mendorong investasi di sektor riil yang tidak hanya produktif tetapi juga memberikan kontribusi langsung dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Instrumen seperti pembiayaan murabahah,

mudharabah, dan musyarakah digunakan untuk merangsang aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

- c. Inklusi Keuangan: Kebijakan moneter syariah berupaya mendukung inklusi keuangan dengan memperluas akses bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan, terhadap layanan keuangan. Melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, ekonomi syariah menawarkan mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial.
- d. Pendanaan Proyek Berkelanjutan: Instrumen keuangan syariah, seperti sukuk hijau (green sukuk), dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek yang berkelanjutan, termasuk pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pengembangan energi terbarukan, serta upaya pelestarian lingkungan hidup.

3. Tantangan kebijakan moneter syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan

- a. Kurangnya Literasi Keuangan Syariah: Mayoritas masyarakat dan pelaku ekonomi masih belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah.
- b. Keterbatasan Infrastruktur Keuangan: Sistem keuangan syariah memerlukan pengembangan infrastruktur yang lebih baik agar kebijakan moneter dapat dijalankan secara efektif.
- c. Peraturan dan Kebijakan yang Belum Terintegrasi: Harmonisasi antara kebijakan moneter konvensional dan syariah masih menjadi tantangan yang signifikan di banyak negara.

4. Solusi menghadapi tantangan tersebut

- a. Meningkatkan edukasi dan literasi di bidang keuangan syariah agar masyarakat lebih memahami konsep dan praktiknya.
- b. Mengembangkan teknologi keuangan (fintech) yang berbasis syariah untuk memperluas akses dan meningkatkan efisiensi.
- c. Mendorong kolaborasi antara otoritas keuangan, akademisi, dan sektor industri untuk merumuskan regulasi yang mendukung integrasi kebijakan moneter syariah.

PEMBAHASAN

Pentingnya Pemahaman Mengenai Kebijakan Moneter

Pemahaman masyarakat mengenai kebijakan moneter memiliki peranan yang krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, serta dalam mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan ekonomi (Pudjiomo dan Sahrah, 2019). Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang kebijakan moneter, mereka akan lebih mampu mengenali dan memahami dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi ekonomi pribadi mereka maupun ekonomi secara keseluruhan. Penulisan konten yang baik memainkan peran penting dalam meningkatkan kejelasan dan menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens yang ditargetkan

(Hidayatu Rohmah dan Taufiqur Rahman, 2023). Ketika masyarakat memahami bagaimana kebijakan moneter—seperti penyesuaian suku bunga dan upaya pengendalian inflasi—dapat berdampak pada harga, tingkat pengangguran, dan akses terhadap kredit, mereka akan lebih siap untuk merespons perubahan tersebut dengan tepat dalam hal pengeluaran, investasi, maupun perencanaan keuangan jangka panjang. Pemahaman yang mendalam tentang kebijakan moneter juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi (Anggraeni dkk. , 2017). Dengan memiliki pengetahuan yang memadai, masyarakat mampu memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan yang diusulkan atau diterapkan oleh otoritas moneter. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang kebijakan moneter dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta respons lembaga-lembaga kebijakan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Anantyasari dkk. , 2024).

Pemahaman tentang kebijakan moneter memainkan peran penting dalam membantu masyarakat mempertimbangkan risiko dan peluang dalam pengambilan keputusan ekonomi mereka. Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi kondisi ekonomi, individu dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan terinformasi terkait tabungan, investasi, dan konsumsi. Selain itu, mereka juga mampu mengelola risiko dengan lebih baik, terutama risiko yang berkaitan dengan fluktuasi suku bunga dan perubahan di pasar. Pentingnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan moneter juga tercermin pada stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan secara keseluruhan (Ningsih dan Diwantara, t. t.). Ketika masyarakat merasa terhubung dan memahami kebijakan moneter yang diterapkan, mereka cenderung memiliki kepercayaan lebih terhadap stabilitas sistem keuangan dan bank sentral. Hal ini, pada gilirannya, dapat mengurangi ketidakpastian dan volatilitas pasar, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peran Kebijakan Moneter dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Peran kebijakan moneter dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya dalam konteks ekonomi syariah, memiliki implikasi yang sangat signifikan dan kompleks. Kebijakan moneter, yang mencakup pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan manajemen likuiditas, memainkan peran kunci dalam mengarahkan arah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indah Aminah Putri dkk pada tahun 2022, diungkapkan bahwa strategi terkait uang berperan penting dalam meningkatkan kondisi keuangan dalam konteks survei Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan uang berfungsi sebagai sarana bagi bank nasional di suatu negara untuk memantau berbagai faktor yang mempengaruhi keuangan. Proses pengaturan tersebut berfokus pada pengendalian berbagai komponen moneter di negara tersebut, termasuk biaya pinjaman serta nilai mata uangnya. Stabilitas nilai mata uang merupakan suatu tujuan penting,

terlepas dari pengaruh faktor internal maupun eksternal. Untuk mencapai hal ini, berbagai sasaran harus diindahkan, seperti menciptakan pemerataan yang ideal, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi yang nyata, serta memastikan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Semua tujuan ini merupakan langkah penting yang harus dicapai agar suatu negara dapat menjelajahi masa depannya dengan sukses (Latifah, 2015). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Milla Naeruz pada tahun 2021 tentang perkembangan perbankan syariah dalam mendukung UMKM melalui kebijakan moneter, dijelaskan bahwa kebijakan moneter merujuk pada rangkaian strategi yang diambil oleh bank sentral, seperti Bank Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dipertukarkan. Upaya ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti mengatur volume uang yang beredar dan menetapkan tingkat suku bunga. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar atau mengubah suku bunga yang berlaku, demi memastikan stabilitas perekonomian.

Meskipun prospek neraca transaksi berjalan pada kuartal pertama tahun 2024 menunjukkan sedikit penurunan akibat menyempitnya surplus perdagangan barang, laporan yang dirilis oleh Bank Indonesia dalam Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2024 mengungkapkan bahwa neraca pembayaran Indonesia (NPI) tetap dalam kondisi menggembirakan dan berkontribusi positif terhadap ketahanan eksternal. Surplus neraca perdagangan turun dari USD 2,0 miliar pada Februari 2023 menjadi USD 0,9 miliar pada Februari 2024. Kendati demikian, arus masuk modal asing tetap bertahan dengan arus masuk bersih mencapai USD 1,4 miliar per 18 Februari 2024, meskipun terdapat sedikit kenaikan pada bulan Maret 2024 karena meningkatnya kerentanan dalam sektor keuangan global. Pada akhir Februari 2024, posisi cadangan devisa Indonesia tetap kokoh, mencapai USD 144,0 miliar, melebihi standar internasional yang setara dengan tiga bulan impor. Secara keseluruhan, neraca pembayaran diperkirakan akan tetap positif sepanjang tahun 2024, dengan defisit transaksi berjalan diproyeksikan kurang dari 1%, yaitu sekitar 0,9% dari PDB. Aliran masuk modal asing yang didorong oleh persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional serta imbal hasil investasi yang menarik diperkirakan akan mendukung neraca transaksi modal dan finansial dalam jangka pendek.

Dalam ekonomi syariah, kebijakan moneter harus mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menolak riba dan mempromosikan distribusi pendapatan yang lebih adil. Kebijakan moneter berperan penting dalam menciptakan lingkungan makro ekonomi yang stabil, yang sangat diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Yupita dkk. , 2023). Dengan memanfaatkan instrumen seperti pengaturan suku bunga dan pengendalian inflasi, kebijakan moneter membantu menjaga kestabilan harga, sehingga pelaku ekonomi dapat merencanakan investasi jangka panjang dengan lebih baik. Dalam konteks ekonomi syariah, kestabilan harga sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika syariah, seperti keadilan dan

kestabilan, tetap terjaga selama proses pembangunan ekonomi. Selain itu, kebijakan moneter juga memengaruhi distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Ketika suku bunga meningkat secara signifikan, hal ini dapat menghambat akses modal bagi sektor-sektor ekonomi yang lebih rentan, seperti Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) serta sektor informal (Ardila Sari dkk.).

Sebaliknya, kebijakan moneter yang lebih longgar dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan mempermudah akses terhadap kredit bagi pelaku usaha kecil serta masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks ekonomi syariah, peran kebijakan moneter dalam distribusi pendapatan menjadi semakin krusial, mengingat prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi (Naeruz, dkk.). Selain itu, kebijakan moneter juga memiliki dampak signifikan terhadap investasi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Dengan memberikan insentif keuangan yang sesuai, seperti suku bunga yang lebih rendah untuk investasi ramah lingkungan atau berbasis syariah, kebijakan moneter dapat mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Solechah dan Sugito, 2023).

Dalam konteks ekonomi syariah, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip lingkungan yang terkandung dalam konsep "halal" dan "haram" saat merumuskan kebijakan moneter yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan cara ini, peran kebijakan moneter dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama dalam kerangka ekonomi syariah, melampaui hanya menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter yang bijaksana dan berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat menjadi elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan (Madubun dkk. , 2023).

Integrasi Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Integrasi kebijakan moneter merupakan suatu upaya untuk menyelaraskan kebijakan tersebut dengan agenda pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam proses ini, kebijakan moneter tidak hanya berfokus pada menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi yang lebih luas (Aqidah dkk. , 2022). Dampak utama dari integrasi kebijakan moneter terletak pada upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menerapkan kebijakan moneter yang tepat, pemerintah dapat merangsang investasi yang mendukung inisiatif berkelanjutan, seperti proyek energi terbarukan, infrastruktur ramah lingkungan, serta sektor-sektor ekonomi lain yang mendukung keberlanjutan. Melalui penyesuaian instrumen kebijakan moneter, seperti suku bunga, pemerintah dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di bidang ini. Dengan cara ini, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak hanya cepat, tetapi juga selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan (Jumario dan Marianus, 2023).

Integrasi kebijakan moneter memiliki dampak signifikan terhadap distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Dengan mempertimbangkan efek distribusi dari kebijakan moneter misalnya, akses terhadap kredit dan suku bunga pemerintah dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat inklusif dan merata. Hal ini berkontribusi pada pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Dayu dkk.,t.t.). Dalam konteks ekonomi syariah, integrasi kebijakan moneter juga memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ekonomi syariah diperhatikan dalam distribusi pendapatan. Selain itu, integrasi kebijakan moneter dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan. Dengan menyesuaikan kebijakan moneter untuk memberikan insentif pada investasi yang ramah lingkungan, pemerintah dapat mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini termasuk mengurangi subsidi untuk energi fosil, memberikan insentif pajak untuk teknologi hijau, dan tindakan lain yang mendorong inovasi serta investasi dalam perlindungan lingkungan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Untuk memahami peran kebijakan moneter dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam kerangka ekonomi syariah, penting untuk melakukan tinjauan terhadap aspek-aspek ekonomi syariah. Analisis yang mendalam mengungkapkan bahwa kebijakan moneter tidak hanya berfokus pada menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas makroekonomi, yang merupakan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui penggunaan instrumen seperti pengaturan suku bunga dan langkah-langkah pengendalian inflasi, kebijakan moneter berupaya menjaga kestabilan harga. Aspek ini sangat krusial dalam konteks ekonomi syariah, karena dapat memastikan keadilan dan stabilitas dalam proses pembangunan ekonomi.

Kebijakan moneter berperan penting dalam memengaruhi distribusi pendapatan dan upaya pengentasan kemiskinan. Melalui penyesuaian suku bunga dan berbagai kebijakan lainnya, kebijakan moneter dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan meningkatkan akses kredit bagi sektor-sektor yang rentan, seperti Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), terutama dalam konteks ekonomi syariah. Langkah ini sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi syariah yang menekankan pengurangan kesenjangan ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Selain itu, kebijakan moneter juga memiliki dampak signifikan terhadap investasi berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Dengan menetapkan insentif keuangan yang tepat, seperti suku bunga rendah untuk investasi yang bersifat ramah lingkungan atau berbasis syariah, kebijakan moneter dapat mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini

mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan perhatian terhadap aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini dapat mengarah kepada eksplorasi mendalam mengenai efektivitas instrumen kebijakan moneter yang berlandaskan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu aspek penting yang perlu diteliti adalah bagaimana instrumen seperti sukuk negara, zakat, wakaf, dan qardhul hasan dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi sekaligus pendorong pembangunan inklusif. Di samping itu, kajian ini juga dapat mengevaluasi peran lembaga keuangan syariah—seperti bank syariah dan koperasi syariah—dalam meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat berpendapatan rendah, dengan harapan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Lebih jauh lagi, penelitian ini bisa menggali potensi sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter yang berbasis syariah untuk mengatasi tantangan global, seperti ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah dan otoritas moneter dalam merancang kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yang menekankan pada kemaslahatan umat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Hasil dari penelitian ini akan memiliki relevansi tidak hanya bagi negara-negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga dapat menjadi acuan global untuk mengintegrasikan nilai-nilai etis ke dalam kebijakan ekonomi.

Apabila diperlukan, penelitian ini dapat dilengkapi dengan studi kasus dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan moneter syariah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, seperti Indonesia, Malaysia, atau beberapa negara di Timur Tengah. Melalui pendekatan multidimensional ini, diharapkan penelitian dapat memperkaya literatur mengenai ekonomi syariah sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam mengatasi tantangan global demi mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dosen Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, terima kasih kepada orang tua yang membantu mendoakan dan memberikan dana buat penelitian ini, terima kasih juga kepada teman2 yang membantu dalam penelitian ini. Terakhir, saya ingin ucapkan kepada orang-orang yang memberikan nasihat atau saran dalam penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anantyasari, M., Sarwono, S., & Alvyana, A. (2024). Peningkatan Literasi Green Economy Berbasis Syariah Melalui Pembuatan Produk Alami dan Pelatihan Digital Marketing. *Journal of Community Development*, 4(3), 196–204. <https://doi.org/10.47134/comdev.v4i3.172>

- Anggraeni, P., Daniels, P., & Davey, P. (2017). The Contribution of Natural Resources on Economic Welfare In Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(3). <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.20>
- Ardila Sari, R., Devi, R., Hafiz Ikhsan, M., & Luis, M. (t.t.). Analisis Kebijakan Moneter Perbankan Syariah Terhadap UMKM di Indonesia. <https://journal.yibri.id/index.php/brijief/>
- Dayu, W., Anggara, W., & Harahap, I. (t.t.). DINAMIKA PRODUKSI DALAM MAKRO EKONOMI ISLAM: ANALISIS TERHADAP PRINSIP-PRINSIP EKONOMI DAN IMPLIKASINYA PADA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
- Hidayatu Rohmah dan Taufiqur Rahman, L., Hidayatu Rohmah, L., Trunojoyo Madura Jl Raya Telang, U., Kamal, K., Bangkalan, K., Timur Taufiqur Rahman, J., & Timur, J. (2023). PENERAPAN GREEN ECONOMY DI DESA TANJUNG KALANG NGANJUK UNTUK MEWUJUDKAN SDGs MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(2).
- Jumario, N., & Marianus, A. S. (2023). Telaah Kebijakan Green Economy di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Energi Baru dan Terbarukan*, 4(2), 123-131. <https://doi.org/10.14710/jebt.2023>.
- Latifah, N. A. (2015). KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 11(2), 124. <https://doi.org/10.21067/jem.v11i2.873>
- Madubun, H., Nuraini Selly, R., & Alazka Ambon, S. (2023). Analisis Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Inovatif di Masa Era Revolusi 4.0. Dalam *Public Policy* (Vol. 4, Nomor 2). <https://stia-saidperintah.ejournal.id/ppj>
- Naeruz, M. (t.t.). ANALISIS PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM MELALUI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA.
- Ningsih, S., & Diwantara, V. (t.t.). Analisis Green Economy Dalam Pengelolaan Barang Bekas di UMKM Daur ulang (Studi Pada Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi).
- Pudjiomo, W. S., & Sahrah, A. (2019). PENGARUH IKLIM ORGANISASI DAN KETERLIBATAN KERJA TERHADAP OCB PEGAWAI. *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 21(2), 78. <https://doi.org/10.26486/psikologi.v21i2.878>
- Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20.

Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, 8(1), 12–23.
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.1487>

Yupita, D., Monica Putri, F., Sulastri, N., Amelia Amanda, P., Pratama, R., Maharani, W., Yunita, V., Susdianto, E., & Islam Negeri Raden Intan Lampung, U. (2023). PENERAPAN GREEN ECONOMY DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH PLASTIK. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(2), 311–318. <https://doi.org/10.62017/wanargi>